

**KORAN
DIGITAL**

**PERTAMA
& GRATIS**

**KORAN
SULSEL**

TERPERCAYA & TERDEPAN

.COM

EDISI RABU

3 SEPTEMBER 2025

12 TERDUGA PELAKU KERUSUHAN DITANGKAP



**PEMKAB DAN MASYARAKAT GOWA
GELAR "DEKLARASI GOWA DAMAI"
TOLAK AKSI ANARKIS**

BACA HALAMAN ... 5



Demonstran menyaksikan pembakaran mobil di halaman Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (29/8/2025) malam. ANTARA/Darwin Fatir.

12 TERDUGA PELAKU KERUSUHAN DITANGKAP

MAKASSAR – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan mengamankan sedikitnya 12 orang terduga pelaku pascakerusuhan demonstrasi yang berujung pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, DPRD Provinsi Sulsel, serta perusakan Kantor DPRD Kota Palopo pada akhir Agustus hingga awal September 2025.

Direktur Reskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Setiadi Sulaksono, menyebutkan 10 orang terduga pelaku diamankan terkait insiden pembakaran Kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulsel pada 29–30 Agustus. “Sudah ada 10 (terduga) yang kita amankan untuk dua gedung DPRD yang dibakar,” ujarnya di Makassar, Selasa (2/9/2025).

Meski begitu, status hukum para terduga pelaku belum ditetapkan karena penyelidikan masih berjalan. Setiadi menegaskan jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah seiring pendalaman kasus.

Sementara itu, dua orang lainnya ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam kerusuhan dan perusakan fasilitas Kantor DPRD Palopo pada 1 September. “Nanti akan dirilis semua, tunggu waktunya. Anggota masih terus bekerja, dan masih ada tersangka lain,” kata Setiadi.

Di sisi lain, tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulsel masih melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kantor DPRD Kota Makassar. Kepala Bidang Labfor, Kombes Pol Wahyu Marsudi, menyatakan proses olah TKP belum rampung.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono, yang meninjau langsung lokasi kebakaran, menjelaskan olah TKP dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara detail. Ia menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku. “Potensial suspek sudah ada. Ke depan mudah-mudahan semua ini bisa segera kami sele-

saikan. Polri akan bertindak lebih tegas karena indikasi kuat sudah ada,” ucapnya.

Kerusuhan di Makassar pada 29–30 Agustus mengakibatkan Kantor DPRD Makassar, DPRD Sulsel, serta dua pos polisi dibakar massa. Sejumlah fasilitas umum ikut dirusak dan dijarah. Dari peristiwa itu, empat orang meninggal dunia—tiga di antaranya akibat terjebak kebakaran di Kantor DPRD Makassar Jalan Andi Pangeran Pettarani, sementara satu pengemudi ojek online tewas setelah dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo karena dituduh intelijen. Puluhan orang lainnya mengalami luka-luka.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar mencatat, estimasi kerugian negara akibat pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar mencapai Rp253,4 miliar. Kerusakan mencakup gedung utama, 67 unit mobil, 15 motor, serta dokumen penting yang hangus terbakar. (ant/KS)

BPBD MAKASSAR KELUARKAN IMBAUAN DARURAT KESELAMATAN DI TENGAH GELOMBANG DEMO

MAKASSAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengeluarkan imbauan kedaruratan bagi masyarakat untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga di tengah gelombang demonstrasi yang masih berlangsung hingga sepekan terakhir.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, dalam surat imbauan yang diterima Selasa (2/9/2025), menyerukan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, menyusul potensi kerusakan susulan. "Mari kita sama-sama jaga Kota Makassar, utamakan keselamatan, dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya atau hoaks," tegas Fadli.

BPBD merilis lima poin panduan keselamatan masyarakat yang wajib diperhatikan. Pertama,

menghindari lokasi rawan kerusakan, dan bila terlanjur berada di area tersebut segera mencari tempat aman. Kedua, mengutamakan keselamatan diri dan keluarga dengan selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, mengamankan rumah dengan memastikan pintu dan jendela terkunci serta mematikan aliran listrik dan gas sebelum meninggalkan rumah. Keempat, mewaspadaai informasi hoaks dengan hanya mengikuti informasi resmi dari BPBD, Pemerintah Kota, dan Kepolisian. Kelima, menyiapkan tas siaga berisi obat-obatan, masker, air minum, dan dokumen penting untuk keperluan evakuasi darurat.

Fadli juga mengimbau masyarakat untuk menunda keperluan mendesak yang mengharuskan berada di area berpotensi konflik, serta tetap berada di rumah sambil memantau perkem-

baran informasi dari pihak berwenang.

BPBD Makassar menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk langkah-langkah mitigasi dan penanganan darurat, agar risiko kejadian dapat diminimalisir secara cepat dan tepat.

Sebelumnya, demonstrasi besar pada 29–30 Agustus 2025 berujung kerusakan dan mengakibatkan Kantor DPRD Makassar, Kantor DPRD Sulsel, serta dua pos polisi dibakar massa. Sejumlah fasilitas umum juga dirusak. Insiden ini menelan 11 korban, dengan empat orang meninggal dunia. Tiga korban tewas akibat kebakaran di Kantor DPRD Makassar Jalan Andi Pangeran Pettarani, sementara satu korban lainnya, seorang pengemudi ojek online, tewas setelah dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo karena dituding sebagai intelijen. (ant/KS)



Aksi massa membakar mobil di Kota Makassar, beberapa hari lalu.



AHLI WARIS ASN KORBAN KEBAKARAN DPRD MAKASSAR TERIMA SANTUNAN RP 379 JUTA

MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melalui PT Taspen menyalurkan santunan senilai Rp379.168.800 kepada ahli waris Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban kebakaran gedung DPRD Makassar pada Jumat (29/8/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Syaiful Akbar, ASN dengan jabatan terakhir Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah. Syaiful menjadi korban saat be-

rusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai empat gedung DPRD yang terbakar akibat aksi massa.

“Korban mendapatkan penghargaan atas jasa pengabdianya dan diberikan kenaikan pangkat anumerta,” ujar Munafri, Selasa (2/9/2025).

Berdasarkan rincian, ahli waris berhak menerima manfaat Tabungan Hari Tua (THT) sebesar Rp78.584.200, serta santunan kematian akibat kecelakaan kerja yang meliputi santunan kematian, uang duka tewas, biaya penguburan, hingga beasiswa untuk

dua anak senilai Rp300.584.600. Dengan demikian, total manfaat yang diterima keluarga korban mencapai Rp379.168.800.

Munafri menegaskan, kehadiran pemerintah bersama Taspen merupakan bentuk penghargaan sekaligus kepedulian terhadap ASN yang gugur dalam tugas. “Semoga bantuan ini, yang merupakan hak almarhum, bisa membantu keluarga terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Kehadiran kami juga untuk memberikan penguatan moril di tengah duka mendalam,” tuturnya. (ant/KS)

PEMKAB DAN MASYARAKAT GOWA GELAR “DEKLARASI GOWA DAMAI” TOLAK AKSI ANARKIS

GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersama seluruh unsur masyarakat menggelar Deklarasi Gowa Damai sebagai bentuk penolakan terhadap aksi unjuk rasa anarkis yang marak terjadi di sejumlah daerah.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa dirinya sebagai kepala daerah memikul tanggung jawab penuh menjaga ketenteraman masyarakat. “Sebagai bupati, saya bertanggung jawab menjaga daerah ini. Saya tidak ingin titik berat keamanan hanya dibebankan kepada TNI dan Polri,” ujarnya saat sambutan di Gowa, Selasa (2/9/2025).

Ia menekankan keamanan dan ketertiban harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan

hanya aparat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, aksi brutal massa yang berujung pada kerusakan hingga pembakaran objek vital di sejumlah daerah, seperti peristiwa di DPRD Makassar dan DPRD Sulsel, tidak boleh terjadi di Gowa.

“Kami tidak ingin ada objek vital di Gowa yang dirusak atau dibakar. Mari kita bangun kekompakan untuk menjaga daerah ini,” tegasnya.

Bupati menilai kekompakan dan rasa kebersamaan adalah benteng utama untuk menciptakan suasana damai. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjaga daerah dari potensi provokasi yang bisa berujung keributan. Ia juga menyoroti kesenjangan sosial sebagai akar persoalan yang kerap memicu keresahan.

“Pemerintah daerah telah menyiapkan program pengentasan kemiskinan sebagai upaya mengatasi kesenjangan tersebut,” jelasnya.

Husniah menambahkan, antisipasi sejak dini harus dilakukan agar kejadian merugikan tidak sampai terjadi. “Besok atau seterusnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang pasti kita harus mengantisipasi mulai sekarang agar tidak ada yang merusak. Ini juga pesan leluhur kita, bahwa menjaga kedamaian adalah kewajiban bersama demi anak cucu kita,” ucapnya.

Dalam Deklarasi Gowa Damai tersebut, berbagai perwakilan menyampaikan orasinya, mulai dari tokoh agama, pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga unsur masyarakat lainnya. (ant/KS)



Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang saat menyampaikan orasinya dalam Deklarasi Gowa Damai menolak demonstrasi anarkis di Gowa, Selasa (2/9/2025). ANTARA/Muh Hasanuddin

PANEN PADI SIDRAP NAIK 100 RIBU TON, HARGA GABAH TERTINGGI NASIONAL

SIDRAP – Produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, mencatat peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, menyebutkan hasil panen sejak April 2025 bertambah hingga 100 ribu ton.

“Sudah ada beberapa lokasi panen perdana yang saya ikuti, dan semuanya mengalami peningkatan produksi,” ujar Syaharuddin usai menghadiri panen perdana di Desa Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Selasa (2/9/2025).

Ia memaparkan, luas lahan sawah di Kecamatan Dua Pitue mencapai kurang lebih 5.800 hektare, dengan Desa Bila Riawa sekitar 968 hektare. Data menunjukkan, panen padi di Sidrap pada April 2024 hanya 200 ribu ton, sementara pada April 2025

melonjak menjadi 303 ribu ton.

“Tahun 2025 naik menjadi 303 ribu ton, bertambah 100 ribu ton dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Menurutnya, lonjakan produksi ini tidak lepas dari sejumlah langkah strategis: distribusi pupuk lebih lancar, ketersediaan air irigasi terjamin, serta pengendalian harga gabah.

Syaharuddin mengungkapkan, harga gabah di Sidrap kini menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni Rp6.800 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. “Saya kontrol tiap bulan lewat rapat di rumah jabatan. Harga harus ditetapkan, pembayaran wajib tunai, timbangan milik kelompok tani, bukan pedagang. Empat belas kelompok tani di sini semuanya sudah punya timbangan, den-

gan potongan maksimal hanya 2 kilogram,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syaharuddin menyebut pada musim tanam ketiga di Desa Bila Riawa, benih akan diseragamkan, berlabel, dan memiliki usia panen 70 hari. Pemerintah juga menjamin penyediaan obat-obatan, pupuk, serta ketersediaan air melalui Dinas PSDA. Di samping itu, lahan sawah baru seluas 60 hektare sudah disurvei untuk dicetak.

Sebagai bupati baru, ia menegaskan fokus pemerintahannya tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga kesehatan dan kerapian lingkungan. “Saya ingatkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Di depan rumah, pagar dibuat seragam warna putih-biru supaya rapi, lampu teras juga dinyalakan agar terang,” katanya. (ant/KS)



Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif saat menggelar panen perdana padi di Desa Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Sidrap, Selasa (2/9/2025).

MENKES TARGETKAN 34 RUMAH SAKIT BISA LAKUKAN OPERASI JANTUNG TERBUKA PADA 2026

MAKASSAR – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan pada akhir 2026 setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah sakit yang mampu melakukan operasi jantung terbuka, termasuk prosedur bypass dan penggantian katup jantung.

“Setidaknya setiap provinsi memiliki rumah sakit yang mampu menangani prosedur bedah jantung terbuka seperti bypass dan penggantian katup jantung,” ujar Budi dalam pereemian kerja sama RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan lembaga kemanusiaan Arab Saudi, King Salman Relief, di Makassar, Selasa (2/9/2025).

Budi menegaskan, pemerin-

tah akan memastikan rumah sakit utama di 34 provinsi menguasai minimal tiga prosedur operasi jantung terbuka. Saat ini RSUP Wahidin di Makassar sudah mampu melakukannya, tetapi komitmen pemerintah adalah memperluas layanan hingga ke daerah tertinggal.

Ia mengungkapkan, pekan depan akan diresmikan prosedur bedah jantung terbuka pertama di salah satu provinsi, sehingga pasien tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang hingga 2–3 jam ke Jawa.

Terkait kerja sama dengan King Salman Relief, Budi menyebut program ini tidak hanya membawa dampak finansial, tetapi juga menghadirkan

transfer teknologi dan pengetahuan medis. Untuk pertama kalinya, peralatan medis tercanggih ditempatkan di luar Pulau Jawa. “Nilai investasi teknologi ini setara dengan miliaran rupiah untuk infrastruktur kesehatan di Indonesia,” katanya.

Direktur Utama RSUP Wahidin Sudirohusodo, Dr Syafri Kamsul Arif, menambahkan bahwa kerja sama ini sangat signifikan karena dapat melayani pasien dari Sulawesi Selatan hingga wilayah Timur Indonesia seperti Papua dan Sulawesi Tengah. Sejak program ini berjalan, sudah 34 operasi jantung berhasil dilakukan, baik pada pasien dewasa maupun anak-anak. (ant/KS)



GRATIS
TANPA IURAN

E-PAPER

koranusantara
www.koranusantara.com

EDISI RABU
3 SEP 2025



BACA HALAMAN 2





Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian memberikan keterangan usai menghadiri gelar perkara tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/9/2025). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

KOMNAS HAM KUMPULKAN REKAMAN CCTV KASUS TEWASNYA AFFAN KURNIAWAN

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengumpulkan rekaman kamera pengawas (Closed-circuit Television/CCTV) untuk mengecek fakta-fakta terkait kematian pengemudi ojek Affan Kurniawan, yang diduga ditabrak dan dilindas kendaraan taktis kepolisian semasa aksi unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

"Kami menyurati secara resmi berbagai instansi yang ada di sepanjang jalan untuk mendapatkan rekaman CCTV dan untuk memastikan keseluruhan fakta-fakta bisa kami kumpulkan sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Ia menyampaikan pentingnya pemeriksaan rekaman video dari kamera-kamera pengawas di sekitar lokasi Affan Kurniawan (21) tertabrak dan terlindas kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri di daerah

Pejompong, Jakarta Pusat, untuk memverifikasi fakta.

"Potongan-potongan fakta yang beredar ini mesti kita verifikasi, termasuk misalnya video-video yang tadi katanya ada yang mendorong, itu perlu kita pastikan secara forensik digital apakah peristiwa itu benar karena kita butuh kepastian, apakah itu genuine(asli) atau sudah merupakan pekerjaan editing," ia menjelaskan.

Komnas HAM juga siap menampung informasi maupun rekaman video dari warga mengenai kejadian yang menimpa Affan.

"Dengan sangat terbuka kami akan menerimanya," ujar Saurlin.

Selain mengumpulkan rekaman CCTV untuk memeriksa fakta, Komnas HAM ingin mendapatkan informasi mengenai percakapan aparat kepolisian yang ada di dalam kendaraan taktis sebelum, pada saat, dan setelah Affan tertabrak dan terlindas kendaraan taktis kepolisian.

"Saya kira itu penting buat kita untuk mendapatkan keseluruhan

fakta-fakta yang dibutuhkan nanti oleh Komnas HAM dalam menyusun laporan pemantauan, penyelidikan, kami yang secara independen dan kemudian melahirkan rekomendasi," kata Saurlin.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat ada sepuluh orang yang meninggal dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah untuk memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR.

Kesepuluh orang tersebut meliputi Affan Kurniawan (Jakarta), Andika Lutfi Falah (Jakarta), Rheza Sindy Pratama (Yogyakarta), Sumari (Solo), Saiful Akbar (Makassar), Muhammad Akbar Basri (Makassar), Sarinawati (Makassar), Rusmadiansyah (Makassar), Iko Juliant Junior (Semarang), dan Septinus Sesa (Manokwari).

Anis menyampaikan bahwa Komnas HAM bekerja sama dengan lembaga HAM yang lain dalam menyelidiki penyebab kematian mereka. (ANT/KN)



Zetro Leonardo Purba, diplomat KBRI Lima, Peru, meninggal setelah ditembak tiga kali. Foto/Peru 21

DIPLOMAT RI DI PERU TEWAS USAI DITEMBAK ORANG TAK DIKENAL

JAKARTA - Seorang diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban penembakan di Lima pada Senin malam (1/9/2025) waktu setempat.

Menurut laporan media setempat Panamericana Television, yang dipantau di Jakarta pada Selasa, diplomat tersebut meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seseorang yang tak dikenal beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah

Lince, Lima.

Penata Kanselera Muda di KBRI Lima tersebut dilaporkan sedang bersepeda bersama istrinya saat ditembak.

Ia sempat dievakuasi ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tak dapat diselamatkan.

Sang istri selamat dari penyerangan tersebut, dan ia saat ini masih di bawah perlindungan kepolisian setempat.

Menurut informasi dari pihak kepolisian setempat, Zetro baru tiba di Peru untuk tugas diplomatiknya lima bulan yang lalu.

Ia diketahui sempat bertugas di KJRI Melbourne, Australia.

Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP tempat wafatnya sang diplomat. Menurut informasi dari media setempat, KBRI Lima telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru terkait peristiwa ini.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI baru menyampaikan pernyataan belasungkawa atas wafatnya Zetro melalui akun Instagram @kemlu_ri. (ANT/KN)



Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto

MENDIKTISAITEK KUTUK TINDAKAN REPRESIF DI UNISBA

JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa gerakan mahasiswa adalah bagian dari gerakan moral dan kompas bangsa yang perlu dihormati. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, sekaligus wujud kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkumpul.

“Suara mahasiswa adalah pengingat bagi semua pihak untuk menjalankan pemerintahan dengan kepekaan, empati terhadap persoalan rakyat, serta kemauan melakukan koreksi atas kebijakan yang belum sejalan dengan pemajuan kesejahteraan rakyat,” ujar Brian dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Sejak 25 Agustus 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) disebutkan memberi perhatian penuh pada kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, baik terkait dinamika di DPR RI maupun tuntutan keadilan bagi korban demonstrasi.

“Kami berada dalam satu tarikan nafas dengan gerakan mahasiswa yang konsisten memperjuangkan keadilan,” tambahnya.

Namun, Mendiktisaintek juga mengutuk keras aksi penjarahan dan provokasi destruktif yang muncul di tengah aksi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa keselamatan mahasiswa harus menjadi prioritas, dan penyampaian aspirasi sebaiknya berlangsung di ruang aman, khususnya di lingkungan kampus, agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Brian menyayangkan insiden penyemprotan gas air mata ke arah kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada 1 September 2025.

“Hal itu dapat dimaknai sebagai serangan terhadap ruang aman kampus,” ujarnya.

Sebelumnya, Rektor UNISBA Harits Nu'man menyampaikan bahwa aparat keamanan telah berupaya mengeluarkan pihak luar yang tidak bertanggung jawab dari area kampus.

Sebagai tindak lanjut, Kemendiktisaintek mengirim tim untuk

berkoordinasi langsung dengan pimpinan perguruan tinggi, menilai dampak yang dialami mahasiswa, staf, maupun fasilitas kampus, serta menyiapkan pendampingan medis dan psikologis. Kementerian juga berkomitmen menjaga kampus tetap menjadi ruang akademik yang bebas dari tindakan represif, menyediakan kanal pengaduan cepat, dan memastikan protokol koordinasi dengan aparat keamanan berjalan baik.

“Demonstrasi mahasiswa adalah gerakan damai untuk mengawal jalannya pemerintahan. Anarki bukan DNA mahasiswa. Ruang akademik harus terlindungi dari tindakan represif maupun penyusupan pihak luar,” tegas Brian.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada para pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi mahasiswa secara langsung, dan menjadikan kampus sebagai contoh terbaik dalam merawat demokrasi yang sehat dan bermartabat. (MK/KN)



Kepala Kepolisian Resor Kota Manokwari Kombes Pol Ongky Isgunawan menyampaikan keterangan se usai mengawal unjuk rasa damai aliansi mahasiswa di Manokwari, Papua Barat, Selasa (2/9/2025). (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

MANOKWARI DIJAGA KETAT, PATROLI TNI-POLRI TERUS DIPERPANJANG

MANOKWARI - Anggota TNI dan Polri masih melanjutkan patroli gabungan di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, menyusul aksi unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan di wilayah tersebut.

"Kami tidak serta merta menarik pasukan tanpa mempertimbangkan situasi daerah. Jadi, operasi gabungan masih berlanjut," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Manokwari Kombes Pol Ongky Isgunawan usai mengawal aksi unjuk rasa damai di Manokwari, Selasa (2/9/2025).

Dia menjelaskan bahwa upaya pengamanan sudah dimu-

lai sejak 28 Agustus 2025, ketika demonstrasi yang dipicu oleh pemindahan empat tahanan politik dari Sorong ke Makassar berujung ricuh.

"Kejadian Kamis minggu lalu itu sangat disayangkan, karena dua kendaraan operasional Polresta yang dirusak massa," katanya.

Ongky mengapresiasi aliansi mahasiswa di Manokwari yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai sesuai ketentuan.

"Saya harapkan organisasi mahasiswa atau organisasi lain bisa menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif," kata Ongky.

Ia menyampaikan bahwa demonstrasi yang diwarnai keributan telah memaksa lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.

Metode pembelajaran jarak jauh semacam itu, menurut dia, kurang efektif diterapkan di daerah yang tidak semua peserta didiknya memiliki sarana akses internet dan penunjang pembelajaran memadai.

"Semoga situasi segera kembali seperti sediakala supaya anak-anak bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah," kata Ongky. (ANT/KN)



Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers di Gedung Sate Bandung, Selasa (2/9/2025). ANTARA/Ricky Prayoga

MUSEUM DI BANDUNG DIJAGA KETAT, PEMPROV TAK TOLERANSI TINDAKAN ANARKIS

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika ada perilaku anarkis mengarah pada aset-aset bersejarah, termasuk museum di daerah itu.

Hal ini dikatakan Dedi untuk mengantisipasi tindakan perusakan dan penjarahan yang mengarah ke museum seperti yang terjadi di Kediri, Jawa Timur, baru-baru ini.

"Kita jaga habis museum-museum yang ada di Bandung dan hari ini kita akan bersikap tegas untuk menjaga aset-aset sejarah yang dimiliki untuk tidak boleh dilakukan perusakan,"

ucap Dedi di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Dedi juga menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan membuka halaman Gedung Sate Bandung dan mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdialog pada Rabu (3/9).

Menurut dia, pihaknya akan memfasilitasi dan melaksanakan berbagai gagasan konstruktif yang terungkap dalam forum tersebut.

Pihaknya mengundang perwakilan mahasiswa dan akademisi dari 350 hingga 420 perguruan tinggi di Jawa Barat, utamanya dari kawasan Bandung Raya.

Rektor Universitas Padjadjaran Arief Sjamsulaksan Kartasmita menilai positif inisiasi membuka dialog tersebut, apalagi juga diundang DPRD Jabar yang diharapkan menjadi kesempatan untuk penyampaian aspirasi secara langsung pada penyelenggara pemerintahan.

"Mudah-mudahan ini membuka ruang komunikasi dan akan menjadi satu titik balik yang sangat baik untuk kita melakukan suatu penyampaian aspirasi yang lebih konstruktif, lebih bersih, lebih berbobot, lebih aman, dan sesuai dengan aturan," ucap Arief. (ANT/KN)



Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha. (ANTARA/Cindy Frishanti/pri)

GEMPA DAHSYAT AFGHANISTAN, 28 WNI DILAPORKAN SELAMAT

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban gempa bumi yang terjadi di Afghanistan pada Minggu (31/8/2025).

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul telah menghubungi simpul-simpul WNI di Afghanistan untuk mengecek kondisi mereka sesuai gempa.

"Sampai saat ini tidak terdapat laporan adanya WNI yang menjadi korban gempa," kata Judha menanggapi pertanyaan wartawan di Jakarta pada Selasa

(2/9/2025).

Ia mengatakan bahwa KBRI Kabul secara berkala akan mengecek keadaan WNI yang tinggal di Afghanistan.

Menurut data Kemlu RI, ada 28 WNI yang tinggal di wilayah Afghanistan. Sebagian besar WNI tercatat tinggal di Kabul. Mereka bekerja di kantor-kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi nirlaba di sana.

Judha mengatakan, WNI di Afghanistan yang memerlukan bantuan dari KBRI Kabul dapat menghubungi nomor telepon +93-797-333-444.

Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), gempa bumi yang berpusat di

27 kilometer timur-timur laut wilayah Jalalabad pada kedalaman 8 kilometer terjadi pada Minggu (31/8) pukul 23.47 waktu setempat, ketika sebagian besar warga Afghanistan sedang tidur.

Bulan Sabit Merah Afghanistan di akun media sosial mereka pada Selasa (2/9/2025), menyampaikan bahwa jumlah korban yang meninggal akibat gempa bumi yang mengguncang Afghanistan timur pada Minggu (31/8) telah mencapai 1.214 orang.

Selain itu, gempa bumi mengakibatkan 3.251 orang cedera dan lebih dari 8.000 rumah rusak di wilayah Afghanistan. (ANT/KN)



Kampus Universitas Pasundan di Bandung. ANTARA/HO-Dokumen Pribadi

UNPAS BANDUNG: SITUASI KAMPUS TERKENDALI USAI INSIDEN 1 SEPTEMBER

BANDUNG - Universitas Pasundan (Unpas) Bandung menyatakan kampus mereka yang terletak di Tamansari Bandung, saat ini dalam keadaan kondusif dan terkendali, setelah terjadinya keributan Senin (1/9) malam sampai Selasa (2/9/2025) dini hari.

"Merespon peristiwa pada 1 September 2025, kami sampaikan kampus saat ini dalam keadaan kondusif, aman dan terkendali," kata Wakil Rektor III Unpas Dr M Budiana, membacakan pernyataan Rektor Unpas Prof Azhar Affandi di Bandung, Selasa (2/9/2025).

Unpas menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah dan upaya guna menciptakan kondisi yang lebih baik ke depannya pascainsiden tersebut.

"Bahwa saat ini kami telah melakukan langkah-langkah dan upaya dengan berbagai pihak untuk menciptakan kondisi yang lebih baik kedepannya," ujar Rektor Unpas.

Diketahui, video peristiwa dugaan penembakan gas air mata

ke area Unpas dan Universitas Islam Bandung (Unisba) di Tamansari ini viral di media sosial Instagram. Video ini diunggah pada akun Instagram Kolektifa dan sudah ditonton hingga 112.358 kali oleh warganet.

Dikabarkan sedikitnya 12 orang menjadi korban tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi di kampus Universitas Pasundan di Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (1/9) malam. Namun pihak kepolisian membantah serangan itu dilakukan dengan sengaja.

Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menduga keributan yang terjadi di sekitar Universitas Islam Bandung (Unisba), pada Senin (1/9) malam, telah direncanakan oleh sekelompok massa.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan aksi massa tersebut didesain untuk memancing aparat agar masuk ke area kampus. Namun, polisi memastikan tidak melakukan penyerangan ke dalam kampus.

"Kami menganalisa ini su-

dah didesain, direncanakan bahwa kami dipancing untuk menyerang kampus, tapi Alhamdulillah kami tidak melakukannya," kata Rudi.

Kapolda menyebut massa berjumlah sekitar 150 - 200 orang berkumpul di Jalan Tamansari dengan melakukan blokade jalan, berpakaian serba hitam, menutup muka, serta membawa batu, besi, dan kayu.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengungkapkan tembakan gas air mata yang terjadi di sekitar Jalan Tamansari dipicu oleh serangan bom molotov dari sekelompok orang berpakaian hitam yang diduga kelompok anarkis.

Hendra menjelaskan kelompok tersebut kemudian melakukan provokasi lebih jauh dengan melempar bom molotov dari dalam kampus ke arah petugas dan kendaraan, termasuk mobil rantis Brimob. Atas kondisi itu, petugas menembakkan gas air mata ke jalan raya. (ANT/KN)



Kunjunhan DPRD Kukar ke proyek pembangunan jembatan di Jalan Kartini ke Jalan Mayjen Panjaitan. (Istimewa)

KETUA DPRD KUKAR TINJAU PROYEK STRATEGIS DI TENGGARONG, PASTIKAN RAMPUNG TEPAT WAKTU

TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, turun langsung meninjau sejumlah proyek strategis di Tenggarong, pada Senin (2/9/2025). Peninjauan ini dilakukan bersama unsur pimpinan DPRD, Komisi III, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono.

Sejumlah lokasi menjadi perhatian, mulai pembangunan jembatan penghubung Jalan Kartini–Jalan Mayjen Panjaitan, Pasar Tangga Arung, hingga turap di kawasan tepian sungai.

DPRD Kukar ingin memastikan setiap proyek berjalan sesuai target, tidak mangkrak, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ya, tentu memang tadi kita langsung ke lapangan, melihat progres pekerjaan terkait dengan jembatan. Setelah dicek langsung, Alhamdulillah sesuai progres. Disampaikan tadi, Insya Allah akhir Desember bisa sele-

sai,” ujarnya.

Ahmad Yani menegaskan, jembatan penghubung yang dikerjakan saat ini sudah sesuai progres, dengan target rampung akhir Desember 2025. Infrastruktur ini diharapkan memperlancar konektivitas warga dan mengurai kepadatan lalu lintas di pusat kota.

Selain jembatan, penataan kawasan tepian sungai juga mendapat perhatian serius. Ahmad Yani menyebut kawasan tersebut harus ditata secantik mungkin agar menjadi destinasi wisata andalan.

“Kita harap pinggiran sungainya ditata secantik mungkin, bahkan bisa mengalahkan destinasi wisata di luar negeri. Minimal sampai Jembatan Mangkuraja, tidak boleh ada lagi rumah-rumah di bantaran sungai. Kalau perlu kita pikirkan proyek multiyears supaya bisa tuntas,” tuturnya.

Bahkan ia menargetkan penataan tepian sungai bisa menyaingi destinasi luar daerah, minimal

hingga Jembatan Mangkuraja. Rumah-rumah di bantaran sungai direncanakan diganti proyek multiyears agar kawasan benar-benar tertata.

Tak hanya itu, rombongan DPRD juga meninjau pembangunan Pasar Tangga Arung yang kini dikonsep lebih modern. Pasar ini akan menjadi pengganti pasar lama dengan fasilitas yang lebih lengkap.

“Walaupun dari luar terlihat sederhana, tapi ini kategori mall. Mall Kukar, mall-nya Tenggarong. Ada ruang terbuka hijau dan masjid. Targetnya akhir tahun selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” ungkapnya.

Targetnya, akhir 2025 pasar modern tersebut bisa selesai dan segera dimanfaatkan masyarakat. Dengan konsep baru, pasar ini diharapkan menjadi ikon baru perdagangan sekaligus destinasi belanja di Tenggarong.

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono. (Istimewa)

PROGRES PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN PASAR TANGGA ARUNG KUKAR MASIH SESUAI TARGET

TENGGARONG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar), Wiyono, sebut proses pembangunan jembatan pengganti Jembatan Besi telah mencapai progres 51 persen, sementara turap menyentuh 60 persen. Ia juga menegaskan Posisi kedua proyek masih sesuai jadwal dan ditargetkan selesai akhir Desember 2025.

“Ada dua paket kegiatan, jembatan ditangani bidang Bina Marga, turap oleh bidang Sumber Daya Air,” ujarnya.

Wiyono menambahkan, Jembatan Besi lama akan ditutup setelah jembatan baru rampung

karena konstruksinya sudah keropos. “Jembatan Besi nanti ditutup untuk kendaraan, hanya bisa untuk pejalan kaki dan sepeda. Akses kendaraan akan dialihkan ke jembatan baru,” kata Wiyono.

Jembatan yang dibangun dengan teknologi girder baja dan dirancang untuk bertahan hingga satu abad ini jadi penghubung strategis baru di pusat kota Tenggarong. Proyek ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025, dengan masa pengerjaan selama 10 bulan oleh kontraktor asal Aceh.

Jembatan baru tersebut akan dibangun sekitar 100 meter dari

posisi Jembatan Besi yang lama. Secara geografis, jembatan ini akan menghubungkan Jalan Danau Semayang hingga Jalan Monumen Barat.

Selain itu, konstruksi ini juga menjadi bagian dari integrasi kawasan strategis yang mencakup Jalan Kertanegara, Bundaran Masjid Agung Sultan Sulaiman, hingga Jalan Kartini.

Kawasan ini dirancang menjadi koridor lalu lintas utama yang mampu meningkatkan efisiensi arus kendaraan dan mendukung konektivitas antarwilayah di Tenggarong. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i